

PROFIL MODAL SOSIAL DAN TINGKAT PARTISIPASI PETERNAKPADA PENGEMBANGAN SAPI POTONG DI KABUPATEN TEBO PROPINSI JAMBI

SyafrilHadi

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
Fakultas Perternakan UGM Yogyakarta
Email: syafril.hadi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat modal sosial peternak sapi potong di Kabupaten Tebo dan mendeskripsikan tingkat partisipasi peternak sapi potong di Kabupaten Tebo. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive random sampling, yang berjumlah 5 orang sebagai unit analisis. Sedangkan untuk penyebaran kuesioner dilakukan pada 165 orang petani yang memelihara sapi potong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat modal sosial peternak sapi potong di Kabupaten Tebo berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi dan tingkat partisipasi peternak sapi potong di Kabupaten Tebo berada pada kategori tinggi.

Kata kunci: modal sosial, partisipasi, efektifitas, pengembangan

ABSTRACT

The purposes of this research are to describe the level of social capital and to identify the level of participation of cattle breeders in Tebo district. The method used in this research is descriptive analysis by using quantitative approach. The sample collection technique used in this research is purposive random sampling which consists of five people as a unit of analysis. The questionnaires were given to 165 respondents who breed the cattle in Tebo. The results of this research show that the level of social capital of cattle breeders in Tebo district is in the very high category and the participant level of cattle breeders is also in the high category.

Keywords: social capital, participation, effectiveness, development

PENDAHULUAN

Realita menunjukkan bahwa selama ini sistem pembangunan pertanian dan peternakan kurang mampu menyediakan bahan pangan asal ternak disamping belum mampu meningkatkan kesejahteraan peternak, adopsi teknologi yang macet, rusaknya lingkungan, serta menggejalanya kepunahan ternak lokal. Upaya-upaya yang telah dilakukan masih belum mampu mengatasi masalah secara holistic dan hanya sebagian kecil terjadi perubahan pola sistem peternakan yang bergerak ke arah agribisnis yang mampu memberi kesempatan dan lapangan kerja serta kenaikan pendapatan peternak, itu pun hanya terjadi di beberapa daerah

tertentu saja. Ketidakberdayaan penyediaan bahan pangan asal ternak dalam negeri dapat memperlemah ketahanan pangan Indonesia dan ketergantungan akan produk impor semakin besar. Untuk mengatasi masalah tersebut-perlu dicari beberapa alternatif pendekatan yang lebih tepat dan lebih bernilai guna.

Salah satu pendekatan dalam pembangunan masyarakat, termasuk didalamnya pembangunan peternak sapi, adalah pendekatan yang berorientasi komunitas (kelompok masyarakat termasuk kelompok tani ternak) yang mengacu pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memiliki ciri yaitu masyarakat diberi peran sebagai pelaku yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya dan menggerakkan proses dalam mencapai tujuan. Pendekatan ini menekankan pada kewenangan komunitas untuk mengelola sumberdaya untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri. Oleh karena itu program dirancang berdasarkan prakarsa dan partisipasi masyarakat sendiri dengan berorientasi pada kebutuhan, potensi dan kemampuannya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau partisipasi anggota kelompok tani dalam suatu kegiatan akan menyebabkan perencanaan suatu program lebih terarah. Artinya, program yang disusun akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau anggota kelompok tani tersebut. Masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi apabila partisipasi tersebut dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan serta partisipasi tersebut dapat memberikan manfaat langsung yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, misalnya kelompok tani.

Terjamin dan terselenggaranya program pemberdayaan yang dilakukan harus mengadopsi keberadaan modal sosial (*social capital*) yang berkembang dimasyarakat. Pemberdayaan tak hanya ditujukan kepada individu personal saja tetapi juga terhadap lembaga (pranata) yang ada di masyarakat, hal ini disebabkan karena pranata tersebut lahir dari budaya masyarakat. Pemberdayaan yang mengedepankan adat dan budaya serta partisipasi masyarakat, cenderung lebih efektif. Keberadaan modal sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan keberadaan modal ekonomi dalam proses pemberdayaan, namun masih sering diabaikan. Fenomena modal sosial oleh banyak ahli bahkan Bank Dunia direkomendasikan sebagai faktor penting yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Keberadaan modal sosial harus diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat. Modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma-norma dan jaringan merupakan modal yang semakin meningkat jika sering digunakan, dimana peningkatan ini akan menjamin perkembangan kelompok. Rasa saling percaya diantara anggota akan meningkatkan kohesitas anggota kelompok yang selanjutnya akan menjamin keberlanjutan kelompok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tingkat modal sosial peternak sapi potong di Kabupaten Tebo dan mendeskripsikan tingkat partisipasi peternak sapi potong di Kabupaten Tebo.

LANDASAN TEORI

Partisipasi

Mubiyarto dan Kartodiharjo (1990) menyebutkan bahwa partisipasi adalah kesediaan masyarakat atau petani untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan bersama untuk mendukung keberhasilan program pembangunan tanpa

mengorbankan kepentingan mereka, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Svastad,dkk (2006) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat lokal membawa pengetahuan lokal yang mengarah ke perencanaan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan manajemen yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian Cooper dan Elliot (2000) menjelaskan mekanisme partisipasi dan evaluasi efektifitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Menggunakan metode studi kasus di tiga program pembangunan, ditemukan hasil bahwa pemanfaatan peluang yang ada dalam partisipasi masyarakat bergantung pada kemampuan mengevaluasi efektifitas partisipasi masyarakat. Manfaat positif partisipasi masyarakat banyak diperoleh dari adanya akseptabilitas sosial. Layzer (2002) yang menguji hipotesis bahwa pengambilan keputusan secara partisipatif menghasilkan solusi yang berkelanjutan dibandingkan dengan proses pembuatan kebijakan secara konvensional.

Hasil kajian Lurian (2004) terfokus pada faktor yang mendorong partisipasi masyarakat bagi pengambilan keputusan dalam pembangunan pemerintah daerah. Penelitian dengan menggunakan metode survey dan dianalisis secara deskriptif menghasilkan bahwa ketidakhadiran anggota kelompok dalam suatu pertemuan dibatasi oleh kurang sadarnya bahwa kegiatan itu sebagai gerakan bersama. Motivasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi. Irvin dan Stansbury (2004) menunjukkan bahwa efektifitas partisipasi masyarakat sebagai alat pembuatan kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 5 kondisi partisipasi masyarakat sebagai alat pembuatan kebijakan yaitu kondisi berbiaya rendah, kondisi sangat bermanfaat, kondisi tidak ideal, kondisi berbiaya tinggi dan kondisi kurang bermanfaat. Dijelaskan juga bahwa terjadi pemborosan sumber daya dalam proses pembuatan kebijakan jika dilakukan dalam kondisi masyarakat yang kurang ideal.

Bryan dan White (2006) menyatakan bahwa partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat mengembangkan kemandirian. Selain itu di usulkan pula perluasan konsep partisipasi tidak hanya mencakup proses perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga partisipasi dalam penerimaan manfaat. Aspek penerimaan manfaat merupakan pelengkap dari cakupan pada proses perencanaan dan pelaksanaan sehingga membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Griesgraber dan Gunter (1996) menambahkan aspek yang lain yaitu evaluasi. Dengan demikian konsep partisipasi menjadi lebih luas, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai penerimaan manfaat.

Menurut Nurmanaf, (2003) terwujudnya partisipasi aktif masyarakat terhadap program akan menumbuhkan motivasi untuk mencapai keberhasilan. Namun kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang yang menyebabkan program tersebut tidak dipahami secara baik sehingga partisipasi masyarakat yang sebenarnya sulit diharapkan dan kemandirian masih jauh dari kenyataan. Mardikanto (2010) menyatakan bahwa kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat dapat disebabkan karena mereka sudah terlalu lama direkayasa untuk tidak perlu berpikir sehingga mereka lebih suka menerima apapun yang harus dilakukan. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif.

Tujuan pendekatan partisipatif adalah pemberdayaan masyarakat yang akan mampu mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan. Dalam pendekatan partisipatif masyarakat didorong untuk mengembangkan pilihan atau alternatif dalam pemecahan masalah, bukan semata-mata sebagai pengguna atau hanya menunggu pemecahan masalah yang ditawarkan oleh pemerintah (Adnyana, 2007). Hikmat (2004) menyatakan bahwa yang paling menentukan keberhasilan pemberdayaan adalah adanya partisipasi dari kelompok sasaran yang akan diberdayakan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkit kemandirian dalam proses pemberdayaan.

Ouma dan Abdulai (2009) menyatakan analisis menunjukkan hubungan yang kuat antara beberapa variabel sosial ekonomi dengan partisipasi dalam inisiatif tindakan kolektif. Rumah tangga miskin lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam inisiatif tindakan kolektif, ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mendorong pembentukan kelompok mungkin efektif dalam perbaikan mata pencaharian penduduk miskin melalui peningkatan akses terhadap ternak sapi.

Modal Sosial

Menurut Putnam (1993) modal sosial merupakan karakteristik organisasi sosial seperti *trust* (rasa saling percaya), norma, dan jaringan kerja yang memudahkan terjadinya koordinasi dan kerjasama untuk kemanfaatan bersama. Sedangkan Coleman (2008) menyebutkan bahwa modal sosial bersifat produktif yang memungkinkan pencapaian tujuan. Tidak seperti modal lainnya, modal sosial melekat pada struktur relasi diantara orang dan dikalangan orang. Subejo (2009) menyebutkan bahwa dalam konteks kebijakan perencanaan pembangunan, pentingnya modal sosial yang disederhanakan kedalam hubungan sosial lokal telah diakui juga oleh perencana pembangunan terakhir. Pengenalan program pembangunan baru tanpa pertimbangan mendalam hubungan masyarakat lokal akan menghasilkan disintegrasi sosial dan bahkan dapat menghancurkan modal sosial.

Syahyuti (2008) menyebutkan bahwa modal sosial dalam suatu masyarakat dapat diperkuat namun membutuhkan dukungan sumber daya tertentu dan agar tercipta hubungan sosial serta kelembagaan yang baik maka anggota masyarakat mesti mendukungnya. Modal sosial berperan sebagai perekat yang mengikat semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Agar modal sosial tumbuh baik dibutuhkan adanya nilai saling berbagi, kepercayaan, dan pengorganisasian peran yang diekspresikan dalam hubungan personal. Menurut Pranadji (2006) menyebutkan bahwa pada masyarakat desa yang memiliki modal sosial yang relatif kuat maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya cenderung tinggi dan proses transformasi sosial ekonominya berlangsung lebih cepat. Program pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agro ekosistem selama ini masih lebih menekankan pada pemberian bantuan material, tetapi kurang pada penguatan modal sosial setempat. Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui penguatan modal sosial perlu diletakkan dalam bingkai transformasi secara berkelanjutan.

Menurut Saragih (2004) modal sosial yang berkembang ditengah masyarakat tertentu merupakan faktor yang signifikan dalam penguatan

(pelemahan) partisipasi masyarakat. Pranadji (2006) menyatakan mengenai penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kabupaten Gunung Kidul dan Boyolali, menjelaskan bahwa model pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agro ekosistem lahan kering yang dinilai efektif adalah yang dilandaskan pada penguatan modal sosial setempat. Penguatan tata nilai merupakan inti dari penguatan modal sosial dan akan efektif jika dimulai dari penguatan kepemimpinan, manajemen sosial, dan keorganisasian masyarakat. Selanjutnya Hasbullah (2006) menyatakan bahwa inti telaah modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu kelompok untuk berkerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama tersebut diwarnai oleh suatu pola interelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat.

Menurut Camaradkk (2005), kelompok partisipan tinggi dan kelompok novator memiliki mobilitas dan jaringan informasi lebih luas dan lebih dekat dengan sistem sosial serta mempunyai kemampuan mempengaruhi anggota kelompok lain. Isham (2000) menyatakan bahwa desa-desa di Tanzania yang mempunyai adopter dengan tingkat modal sosial lebih tinggi dan aktifitas penyuluhan lebih banyak, mempunyai tingkat partisipasi dan adopsi inovasi lebih tinggi dan terjadi difusi informasi inovasi baru lebih berhasil. Suatu masyarakat dengan tingkat modal sosial yang tinggi mempunyai lebih banyak informasi inovasi yang dimiliki dan mengadopsi inovasi lebih cepat.

Tjahjono (2006) menunjukkan bahwa modal sosial berperan memoderasi jenis keadilan pada kepuasan dan komitmen. Mereka yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bersikap lebih stabil terhadap derajat keadilan. Sedangkan penelitian Rahmawati (2011) menyimpulkan bahwa kepercayaan (modal sosial) sebagai variabel moderasi mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara modal sosial dengan program OCB. Adanya kepercayaan dalam diri seorang individu yang tinggi akan semakin memperkuat modal sosial yang melekat dalam diri individu tersebut.

Rosa, dkk (2003) menyebutkan bahwa modal sosial berfungsi sebagai jembatan untuk membangun unit-unit pengelolaan sehingga memungkinkan pengintegrasian pengelolaan lanskap heterogen yang melibatkan semua pihak. Modal sosial dapat mendorong kohesi internal dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan organisasi dan sumberdaya internal dalam membuat kesepakatan serta melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan. Modal sosial juga dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam bernegosiasi dengan pihak luar untuk memperoleh dukungan yang akan digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Senada dengan itu Putra (2009) menyatakan bahwa peran modal sosial dalam pembangunan masyarakat adalah membangun dan memperkuat partisipasi masyarakat serta membentuk solidaritas sosial dengan pilar kesukarelaan.

Susilawati (2005) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat modal sosial yang tinggi memperkuat keberhasilan program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul, berkaitan dengan kemampuan kelompok tani dalam mematuhi ketentuan pelaksanaan program. Elemen modal sosial yang memperkuat keberhasilan program adalah faktor kunci, kepercayaan, partisipasi, motivasi, jaringan kerja, rasa memiliki, kemampuan berorganisasi dan kemampuan mengelola usaha. Hasbullah (2006) menyatakan bahwa modal sosial

memperkuat perubahan ditengah masyarakat dan memperluas kesadaran bahwa banyak cara yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki kualitas hidup secara bersama-sama. Masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat akan cenderung lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Modal sosial yang kuat lebih memudahkan informasi dan ide dari luar merangsang dan memperkuat program pengembangan suatu kelompok masyarakat.

Fukuyama (2002) menyatakan bahwa modal sosial yang tumbuh pada suatu komunitas sangat membantu dan memperkuat entitas masyarakat tersebut dalam bentuk kemampuan untuk menciptakan dan mentransfer ide dan pemikiran yang membuat suatu organisasi (kelompok) menjadi efektif. Putnam (Hasbullah, 2006) menyebutkan bahwa modal sosial yang tinggi akan membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan. Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi akan banyak membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan wilayah. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan akan jauh lebih efektif jika dilakukan pada masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat.

Menurut Evans (2005) modal sosial diperkenalkan sebagai moderator model kinerja kelompok dalam meningkatkan proses kelompok komunikasi, integrasi sosial, dan koordinasi. Proses kelompok ditingkatkan pada gilirannya menyebabkan peningkatan kinerja kelompok. Dikatakan bahwa modal sosial menawarkan janji untuk memahami dan meningkatkan kinerja beragam kelompok fungsional. Gadot (2005) meneliti pengaruh *moderating* modal sosial (kepercayaan, dan dukungan sosial dan timbal balik) pada kinerja pekerjaan. Model ini diuji secara empiris berdasarkan data yang dikumpulkan antara 142 akademisi disalah satu universitas. Temuan berdasarkan analisis interaksi efek mendukung hipotesis bahwa modal sosial adalah moderator yang baik.

Daryanto (2011) menyebutkan bahwa seringkali program-program pemerintah yg diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga peternak miskin dipedesaan belum berjalan dengan baik karena pendekatannya masih bersifat struktural dan mengabaikan variabel-variabel modal sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan memanfaatkan dan meningkatkan kualitas modal sosial, pertumbuhan ekonomi pedesaan bisa ditingkatkan dengan lebih tinggi. Sedangkan Subejo (2008) menyatakan bahwa pemahaman yang mendalam tentang sumberdaya lokal utamanya komunitas lokal yang antara lain mencakup pola hubungan dan jaringan kerjasama yang lebih dikenal secara luas sebagai modal sosial, merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan sumberdaya sosial (modal sosial) secara optimal akan mendukung peningkatan efektifitas program pembangunan pedesaan.

Menurut Heryanto (2012) interaksi yang terjadi antara orang-orang dalam suatu komunitas yang berlangsung relatif lama akan melahirkan modal sosial, yaitu ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerjasama secara gotong royong, merasa aman untuk berbicara serta mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Sedangkan Kusdarjito (2012) menyebutkan bahwa pendekatan modal sosial, jejaring sosial dan *community development* belum

banyak dipakai. Berkaitan dengan perubahan yang sangat cepat dan untuk menghindari terjadinya marjinalisasi petani, upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal sosial sangat diperlukan.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang fenomena yang ada, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dari implikasi suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh (Nasir, 1998).

Sasaran dalam penelitian ini adalah kelompok tani sapi potong di Kabupaten Tebo berjumlah 33 kelompok tani yang memelihara sapi potong. Responden adalah peternak sapi potong anggota kelompok tani yang ada di Kabupaten Tebo. Responden sebagai unit analisis dalam penelitian ini diambil 5 orang terdiri dari pengurus dan anggota dari tiap kelompok secara *purposive random sampling*, dengan ketentuan anggota kelompok yang memiliki ternak sapi potong dan telah menjadi anggota minimal 2 tahun, sehingga jumlah responden seluruhnya adalah 165 orang.

Cara penentuan skor dilakukan dengan mempertimbangkan konsistensi antara skor pertanyaan dengan skor skala, digunakan metode pengukuran dengan *skala likert* (Ridwan dan Sunarto, 2007). Metode ini merupakan metode pernyataan yang menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai atau skalanya. Dalam melakukan metode ini responden diminta untuk memberikan jawaban dalam 5 macam kategori terhadap pertanyaan dari masing-masing variabel, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju dengan kemungkinan skor 1, 2, 3, 4 dan 5.

Untuk penentuan nilai skala atau skor digunakan deviasi normal, yaitu untuk memberikan bobot yang tertinggi bagi kategori jawaban yang sesuai dan memberikan bobot rendah bagi kategori jawaban yang tidak sesuai (*favourable*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Jumlah penduduk Kabupaten Tebo tahun 2012 sebanyak 313.420 jiwa, terdiri dari 161.725 jiwa laki-laki dan 151.695 jiwa perempuan. Angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tebo tahun 2012 sebesar 52,35%, artinya setiap seratus orang penduduk berusia produktif (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 52 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dia anggap tidak produktif lagi (64 tahun ke atas).

Secara absolut penduduk Kabupaten Tebo terus bertambah, namun juga dilihat dari laju pertumbuhannya sangat fluktuatif. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tebo tahun 2012 sebesar 2,69%.

Profil Modal Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat modal sosial peternak sapi potong di Kabupaten Tebo secara umum berada pada kategori tinggi dengan rata-rata skor 3,8, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tingkat Modal Sosial Peternak Sapi Potong di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

No	Elemen Modal Sosial	Kategori (%)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Kepercayaan	11,97	63,56	21,89	2,58	-
2	Norma-norma	14,36	66,96	16,83	1,85	-
3	Jaringan	7,58	59,96	28,31	4,15	-
Total		11,70	62,79	22,66	2,91	-

Tingginya tingkat modal sosial tersebut diduga adanya kesamaan kultur dan budaya karena pada umumnya peternak sapi tak sama-sama berasal dari daerah yang relatif sama yaitu dari Jawa serta adanya kesamaan kepentingan sebagai masyarakat perantau yang menginginkan kehidupan yang lebih baik.

Modal sosial yang tinggi akan dapat meningkatkan jaringan kerja sama, hubungan sosial, dan interaksi antar peternak maupun kelompok dalam mencari informasi inovasi yang lebih banyak, kerja sama dalam kegiatan usaha tani dan penerapan inovasi dalam upaya meningkatkan produksi dan populasi ternak sapi potong. Peternak yang memiliki modal sosial yang tinggi cenderung memiliki informasi inovasi yang lebih banyak sehingga berpotensi menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan produktifitas. Relasi dan interaksi antar individu di dalam maupun di luar kelompok dalam suatu jaringan merupakan salah satu elemen modal sosial.

Tingginya tingkat modal sosial tersebut diharapkan akan dapat memperkuat partisipasi peternak dalam mengembangkan usaha peternakan sapi potong agar lebih produktif dan memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Modal sosial yang tinggi ditandai dengan adanya jaringan kerja sama yang cukup luas, hubungan sosial dan interaksi antar peternak maupun kelompok dalam mencari informasi inovasi, kerja sama dalam kegiatan usaha tani dan penerapan inovasi, penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil. Hal ini sejalan dengan yang kemukakan Fukuyama (2002) yang menyatakan bahwa dengan bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, hubungan antar manusia akan menghasilkan saling kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur. Penelitian Bolu (2011) mengemukakan hal yang senada bahwa modal sosial merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pertanian dan pengembangan ekonomi pedesaan.

Modal sosial yang kuat akan memudahkan para anggota kelompok menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang dapat menunjang usaha tani mereka. Ciri masyarakat pedesaan yang suka melakukan kegiatan kolektif melalui hubungan sosial dan berbagai jenis jaringan kerja sama, saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, dan mentaati norma-norma yang dianut bersama, merupakan elemen-elemen modal sosial yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktifitas usaha ternak sapi potong di kabupaten Tebo. Masyarakat desa masih mempertahankan tradisi gotong royong dan musyawarah mufakat yang merupakan ciri dari kuatnya modal sosial setempat. Penelitian Pramudji (2006) mengenai penguatan modal sosial untuk perberdayaan masyarakat pedesaan di gunung Kidul dan Boyolali menjelaskan bahwa model perberdayaan masyarakat pedesaan dimulai efektif bila dilandaskan pada

penguatan modal sosial. Senada dengan itu Subejo (2009) menyebutkan bahwa dalam konteks kebijakan perencanaan pembangunan, pentingnya modal sosial yang disederhanakan kedalam hubungan sosial lokal, telah diakui juga oleh perencanaan pembangunan terakhir. Pengenalan program baru tanpa pertimbangan mendalam hubungan masyarakat lokal, akan menghasilkan disintegrasi sosial dan bahkan dapat menghancurkan modal sosial. Dinyatakan pula bahwa modal sosial dapat dianggap memiliki peran sentral karena memiliki 3 mekanisme yaitu *sharing* informasi antar anggota, mengurangi *opportunities behavior* dan memfasilitasi pembuatan keputusan kolektif.

Peternak sapi di Kabupaten Tebo dengan modal sosial yang tinggi diharapkan akan dapat memperkuat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam mengembangkan ternak sapi dengan tujuan untuk dapat meningkatkan populasi ternak sapi potong di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tebo melalui peningkatan adopsi inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktifitas usaha. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Basuki, dkk (2001) bahwa tingkat adopsi inovasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pendekatan, dan metode diseminasi yang dilakukan, akan tetapi juga sangat ditentukan oleh kekuatan modal sosial dan keterdedahan informasi inovasi. Adopsi inovasi bertahan dan berkelanjutan jika pengembangan inovasi tersebut di kaitkan dengan kondisi kehidupan dan pekerjaan para petani yang bersangkutan serta mampu memobilisasi dan bertumpu pada potensi-potensi lokal. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di daerah Jambi masih mendatangkan sapi-sapi dari luar Jambi, terutama dari daerah Lampung. Adalah suatu prestasi yang membanggakan apabila populasi sapi potong di Tebo dapat memenuhi kebutuhan lokal, apalagi kebutuhan nasional serta dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan peternak itu sendiri. Winarso (2007) menyatakan bahwa kuatnya permintaan daging belum sepenuhnya bisa diatasi oleh pasokan serta ketersediaan sapi potong di wilayah sentra produsen. Tingginya permintaan konsumen setempat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan populasi yang signifikan justru menyebabkan adanya pengurang populasi sapi potong. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang berkepentingan.

Partisipasi

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan diberbagai tempat ataupun kelompok, sering terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat partisipasi peternak sapi di Kabupaten Tebo berada pada kategori tinggi (57,97%) dan sangat tinggi (10,78%), hanya 23,76% berpartisipasi sedang dengan rata-rata skor 3,7. Kondisi ini menggambarkan bahwa peternak cukup aktif dalam mengembangkan usaha pemeliharaan sapi mereka. Bila dilihat berdasarkan tahap partisipasi ternyata juga terjadi hal yang sama seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.
Tingkat Partisipasi Peternak Sapi Potong di Kabupaten Tebo

No	Tahap	Tingkat Partisipasi (%)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Perencanaan	11,74	53,00	24,30	8,48	2,48
2	Pelaksanaan	10,41	61,60	22,32	4,24	1,43
3	Pemanfaatan	10,48	62,86	20,34	3,98	2,34
4	Evaluasi	9,94	54,06	30,54	3,52	1,94

Dari tabel diatas terlihat juga bahwa terjadi perbedaan tingkat partisipasi peternak dimana pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil relatif lebih tinggi dibanding partisipasi tahap perencanaan dan evaluasi.

Tingginya partisipasi peternak sapi di Kabupaten Tebo ditunjang karena mayoritas peternak adalah petani yang sudah bisa memelihara sapi dengan tingkat pengalaman berternak diatas 4 tahun serta telah merasakan manfaat yang nyata dari kegiatan pemeliharaan sapi tersebut.

Partisipasi yang dilakukan oleh peternak dilakukan dengan kesadaran atau sukarela. Bentuk partisipasi bukan saja berupa materi (uang, benda, barang) akan tetapi juga dalam bentuk ide-ide (gagasan, informasi, saran, tenaga, pemikiran, dan lain-lain). Partisipasi juga merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap kelompok. Partisipasi juga menghendaki kontribusi pada kepentingan dan tujuan kelompok.

Terkait dengan adanya faktor yang mendorong seseorang atau masyarakat melakukan partisipasi, Saragih (2004) menyatakan bahwa partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya modal yang dimiliki seseorang. Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki modal sosial yaitu jaringan kerja, aturan-aturan atau norma yang jelas serta kepercayaan. Dikatakannya juga bahwa modal sosial yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat merupakan faktor yang signifikan dalam penguatan partisipasi masyarakat.

Partisipasi juga akan dipengaruhi oleh kesadaran serta kemampuan atau kapasitas masyarakatnya. Kesadaran berkaitan dengan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban berpartisipasi sekaligus kemauan masyarakat untuk melaksanakan hak atau kewajiban berpartisipasi yang diketahuinya. Sedangkan kapasitas berkaitan dengan kemampuan yang tentukan untuk melakukan partisipasi. Keterampilan teknis dan pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan, diperlukan agar partisipasi tersebut lebih efektif dan efisien. Berbagai keuntungan ekonomis akan dapat diperoleh bila memiliki cukup pengetahuan dan keterampilan teknis dalam menjalin dan membangun jaringan dengan berbagai pelaku pembangunan lainnya. Disinilah peran dan kontribusi pihak lain diperlukan, seperti PPL, LSM, Bank, dan lain-lain.

Suatu komunitas (kelompok) yang sosial, mandiri dan mantap akan memiliki kemampuan untuk mengerahkan sumber daya yang ada. Hal ini dimungkinkan apabila peternak sebagai anggota kelompok memiliki kualitas sumber daya yang memiliki kemampuan untuk merumuskan keinginan dan aspirasinya serta dapat mengambil keputusan atas apa yang direncanakan. Pemerintah sebetulnya dapat menciptakan kondisi yang mendorong partisipasi masyarakat secara bertahap melalui proses pembelajaran dan kemampuan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Penelitian Goldsmith dan Blustain (Ndraha, 1990) menyimpulkan bahwa partisipasi dilakukan melalui organisasi atau kelompok yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditempat-tempat masyarakat, memberikan manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan dan adanya kontrol. Partisipasi ternyata berkurang jika masyarakat kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Wujud atau bentuk partisipasi peternak sapi potong di Rimbo Bujang dalam kegiatan pengembangan usaha ternak mereka terjadi dalam beberapa bentuk ataupun wujud seperti pemberian informasi, penyampaian ide dan masalah, sumbangan tenaga, barang/benda, dana, dan lain-lain. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Hamidjoyo (1991) bahwa partisipasi masyarakat dalam kelompok tani pada dasarnya beraneka macam wujud seperti partisipasi dalam bentuk ide-ide, tenaga, keterampilan, benda dan dana (uang).

Modal sosial peternak sapi potong di kabupaten Tebo yang relatif tinggi, diduga akan memperkuat dan mendukung partisipasi mereka dalam berusaha tani, selain faktor karakteristik peternak itu sendiri. Penelitian Pudjianto (2009), Gautama (2006), dan Husodo (2006) menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi seperti pengalaman/ wawasan petani, usia, motivasi, pendidikan, komunikasi, dinamika kelompok, kekompakan, sikap atau persepsi, serta peran pendamping. Hasil penelitian yang telah dilakukan Tim dari Universitas Padjajaran (Mardikato, 1993) memperlihatkan bahwa motivasi utama keikutsertaan (partisipasi) anggota kelompok tani lebih cenderung didorong oleh hasrat meningkatkan kemampuan berusaha tani dan pemenuhan kebutuhan pokok. Hal yang sama juga terjadi pada peternak sapi di Kabupaten Tebo dimana partisipasi anggota kelompok dilandasi oleh pertimbangan untuk meningkatkan usaha yang bersifat ekonomis.

Kegiatan di kelompok tani sebagai wadah peternak dilakukan tidak terlepas dari partisipasi anggota kelompok dalam menjalankan aktivitasnya dalam upaya mengembangkan usaha pemeliharaan sapi potong seperti masalah pakan, bibit, manajemen pemeliharaan, pemasaran, kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain. Permasalahan yang sering dihadapi peternak dalam upaya pengembangan usaha mereka pada umumnya adalah sulitnya mendapatkan bibit yang baik, walaupun ada harganya relatif mahal dan sulit di jangkau peternak, terbatasnya modal yang dimiliki, masalah pakan pada musim kemarau, dan lain-lain. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa tingkat partisipasi peternak relatif tinggi sebenarnya merupakan peluang yang sangat baik untuk dapat meningkatkan produktivitas usaha ternak sapi di Kabupaten Tebo. Berbagai pihak terkait sudah saatnya ikut terlibat aktif membantu mencari solusi dari permasalahan yang ada tersebut. Mungkin sudah saatnya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk dikembangkan di beberapa desa yang potensial. Program Agro Techno Park (ATP) milik Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) juga perlu dikembangkan di beberapa kecamatan yang potensial. Diharapkan sinergi dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Tebo, dapat meningkatkan produktivitas dan sekaligus meningkatkan populasi ternak sapi, khususnya di Kabupaten Tebo, sehingga keinginan untuk menjadikan Kabupaten Tebo sebagai daerah produsen sapi potong dapat terwujud, disamping meningkatkan kesejahteraan peternak sapi itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan walaupun tingkat partisipasi pada tahap perencanaan tergolong tinggi (64,7%) dengan skor rata-rata 3,63, ternyata adalah

tingkat yang paling rendah bila dibandingkan dengan partisipasi tahap lainnya, seperti tahap pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi. Sebenarnya tingkat partisipasi tersebut masih dapat ditingkatkan dengan memberikan dorongan yang lebih besar melalui berbagai pendekatan yang tepat. Hasil penelitian Syaifudin (2002) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penting yang dapat mendorong partisipasi pada tahap perencanaan ini seperti keterbukaan dan komitmen dari aparat pemerintah di tingkat kabupaten maupun lokal yang menciptakan kondisi yang memberikan rasa nyaman, dukungan pihak luar seperti perguruan tinggi, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki akses informasi keahlian, dana, dan lain-lain. Dukungan dalam bentuk proses fasilitasi partisipasi berupa pendampingan merupakan salah satu bentuk kontribusi besar yang diberikan. Faktor motivasi yang tinggi dan kesiapan dari anggota komunitas untuk berkontribusi dalam setiap kegiatan kelompok, adalah juga faktor yang akan dapat mendorong proses partisipasi tersebut.

Partisipasi peternak sapi potong di Kabupaten Tebo yang tinggi merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi kegiatan pengembangan usaha sapi yang dilaksanakan. Pendekatan partisipatif ini seharusnya melibatkan semua anggota kelompok dalam segenap prosesnya, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan tahap evaluasi atau pengendaliannya. Wilcox (Haeruman, 2005) mengemukakan bahwa untuk membangun partisipasi setidaknya diperlukan 4 tahapan utama yaitu inisiasi, membangun kepercayaan, tingkat/ tahap partisipasi yang diharapkan, dan kesinambungan. Keberlanjutan partisipasi tersebut sangat ditentukan oleh seberapa banyak program yang diikuti serta seberapa puas terhadap manfaat yang diperoleh sesuai harapan. Sepertinya pendapat Wilcox tersebut telah tercermin pada peternak sapi potong di Kabupaten Tebo, tercermin dari tingginya tingkat partisipasi peternak tersebut. Suatu hal yang penting adalah keberlanjutan atau kesinambungan partisipasi tersebut harus terjaga dan bila perlu harus ditingkatkan lagi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu maka disimpulkan bahwatingkat modal sosial peternak sapi potong di Kabupaten Tebo berada pada kategori tinggi (62,79%) dan sangat tinggi (11,70%) dengan skor rata-rata 3,8 dan tingkat partisipasi peternak sapi potong di Kabupaten Tebo berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata 3,7 (57,97% tinggi dan 10,78% sangat tinggi).

Saran

Perlu dikaji lebih lanjut mengenai modal sosial sebagai variabel moderasi yang memperkuat partisipasi peternak dalam peningkatan efektifitas pengembangan sapi potong di Kabupaten Tebo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyana M.O, 2007. **Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Berkelanjutan**. FAE. Program Pengembangan Potensi Sosial Ekonomi Pertanian Departemen Pertanian, Bogor : Vol. 19 No 2 Tahun 2007.

- Basuki, I., K. Wahyu, A. Nurwati, 2011. **Evaluasi adopsi dan dampak penelitian dan pengkajian**, IPPTP, Mataram
- Bolu, Y.G, 2011. **Kajian Pengaruh Modal Sosial dan Keterdedahan Informasi Inovasi Terhadap Tingkat Adopsi Inovasi Jagung di Kabupaten Lombok Timur**. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Bryant, C and L.G White, 2006. **Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang**. LP3ES, Jakarta.
- Camara, G.F. Forseca, A.M. Monteiro, H. Ousrud, 2005. **Networks of Inovation and the Establishment of Spatial Data Infra Structur in Brazil**. Manuscript to the Journal Information Technology for Development Image Processing Division, National Institute for Space Research. Samjose dos Compos. Brazil.
- Coleman, J.S, 2008. **Dasar-Dasar Teori Sosial**. Nusa Media. Bandung.
- Cooper, L dan J.A Ellent, 2000. **Public Participation and Social Acceptability in the Philippines ETA Process**. Journal of Environmental Assesment Policy and Management, Vol 2 No 3. Tahun 2000.
- Daryanto, A, 2011. **Peran Modal Sosial Dalam Pembangunan Peternakan**. Trobos, Jakarta. Edisi Januari 2011.
- Evans, W.R, 2005. **A social capital explanation of the relationship between functional diversity and group performnace**. Emerald Group Publishing Limited. Alabama USA.
- Fukuyama, F, 2002. **Social Capital and Development**. The Coming Agenda. SAIS Review XXII. Free Press. Newyork.
- Gadot, E.V, 2005. **Organizational Politics and Job Performnace: The Moderating Effect of Social Capital**. Division of Public Administration & Policy, School of Political Sciences, University of Haifa, Mount Carmel 31905 Haifa, Israel.
- Gautama, I, 2006. **Dinamika Partisipasi Masyarakat Di Daerah Aliran Sungai**. Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 6 No.3.
- Grisgraber, J.M and B.G Gunter, 1996. **Development: New Paradigms and Principle for The Twenty First Century**. Pluto Press East Havey, CT.
- Haerumann, J.H, 2005. **Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia dimasa Mendatang**. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Kehutanan IPB < Bogor.
- Hamidjoyo, S, 1991. **Keterlibatan Wanita Dalam Sistem Usaha Tani Berkonservasi Selami Das Brantas Kabupaten Malaya**. Yayasan Pembangunan Desa, Malang.
- Hasbullah, J, 2006. **Social Capital Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia**. MR United Press. Jakarta.
- Heryanto, M,A, 2012. **Metodologi Dinamika Sistem (System Dinamic) Dalam Penelitian Sosial: Bagaimana Modal Sosial Dapat Meningkatkan Produktivitas Masyarakat**. Prosiding Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluh Pertanian Indonesia. Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Hikmat, H. 2004. **Strategi Pemberdayaan Masyarakat**. Humaniora Utama Press. Bandung.

- Husodo, S, 2006. **Partisipasi Petani Dalam DAFEP Di Kabupaten Bantul**. Jurnal Ilmu- ilmu Pertanian. Vol. 2 No. 1 Tahun 2006.
- Ilham, NY, 2006. **Analisis Sosial Ekonomi dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging 2010**. Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor : Vol. 4 No 2
- Irvin, R and J. Stansburgh, 2004. **Citizen Participation in Decision Making : Is It Worth the Effort**. Public Administration Review, Vol 64 No 1.
- Kusdarjito,C, 2012. **Peran Analisis Jejaring Sosial dan Modal Sosial Dalam Penyuluhan Pertanian**. Prosiding Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Indonesia. Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Layzer, J.A, 2002. **Citizen Participation and Government Choice in Local Environmental Centre** Versies Policy Study Journal, Urban, Vol. 30 No. 2 Tahun 2002.
- Lurin, L, 2004. **Public Participation in Environmental Decision Making Finding For Communities Facing Toxic Waste Cleanp**.Journal of American Planning Association.Chicago, Vol. 70 No. 1 Tahun 2004.
- Mardikanto, T, 2010. **Komunikasi Pembangunan**. UNS Press. Surakarta.
- Mubyarto dan Kartodihardjo, 1990. **Pembangunan Pedesaan di Indonesia**. Liberty, Jakarta.
- Nasir, M, 1998.**Metode Penelitian**. Ghalib. Jakarta.
- Ndraha, T, 1990. **Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas**. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurmanaf, A.R, 2003. **Partisipasi Masyarakat Petani Terhadap Penanggulangan Kemiskinan**. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor, Analisis Kebijakan Pertanian. Vol. 1 No. 2 Tahun 2003.
- Ouma,E and A, Abdulai, 2009. **Contributions of Social Capital Theory in Predicting Collective Action Behavior among Livestock Keeping Communities in Kenya**. Contributed Paper Prepared for Presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference , Beijing, China, August 16-22, 2009.
- Padmowihardjo, S, 2006. **Penyuluhan Pendampingan Partisipatif**. Jurnal Penyuluhan Pertanian Institut Pertanian Bogor. Vol. 2 No. 1 Tahun 2006.
- Pranadji, T. 2006.**Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Agro Ekosistem Lahan Kering**.Journal Agro Ekonomi. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.Vol 24. No 2. Tahun 2006.
- Pudjianto, K, 2009. **Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan di Sub Das Kedaung, Daerah Hulu Das Bengawan Solo**. Tesis, IPB, Bogor.
- Putnam,R.D, 1993. **Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy**. Priceton University Press.USA.
- Putra, IMK, 2009. **Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Desa Pakraman**. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.

- Rahmawati, D, 2011. **Model Hubungan Modal Sosial, Kepercayaan dan OCB di PDAM Tirta Kehuripan Kab. Bogor**. Tesis . Program Pasca Sarjana IPB, Bogor.
- Rosa. H, S. Kandel, L. Dimas, 2003. **Kompensasi Jasa Ekosistem dan Masyarakat Pedesaan: Pengalaman Dari Negara-Negara Amerika**. Prisma: www.worldagroforestrycentre.com.
- Saragih, T.P, 2004. **Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, Alternatif Pemberdayaan Desa**. Cv. Cipruy. Jakarta.
- Subejo, 2008. **Promoting Social Capital For Rural Community Development**. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta. Vol. 4 No. 1 Tahun 2008.
-, 2009. **Revitalising Social Capital**. Published on The Brunei Times. (<http://www.bt.com.bn>)
- Susilowati, R, 2005. **Peran Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan di Kab. Gunung Kidul**. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Svarstad, H, K. Daugstad, O.I. Vistod, I. Gulvik, 2006. **New Protected Areas in Norway: Local Participation Without Gender Equality**. Mountain Research and Development. Vol. 26 No. 1 Tahunj 2006.
- Tjahyono, H,K. 2006. **Pengaruh Keadilan Keorganisasian Pada Kepuasan Individu dan Komitmen Keorganisasian Dengan Modal Sosial Sebagai Variabel Toleransi**. Disertasi Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Winarso, B, 2007. **Intensitas Pengembangan Ternak Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan**. Prosiding Seminar Nasional. Pusat Analisis Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian, Bogor.

